

Pelatihan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Tingkat Program Studi di Lingkungan FKIP Untan

Muhammad Basri ¹, Heni Kuswanti ², Fithra Ramadian ³

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura

Email: muhammad.basri@fkip.untan.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : Desember 2024

Disetujui : Januari 2025

Kata Kunci :

Pelatihan, Manajemen
Pembiayaan Pendidikan,
Remunerasi.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan keterampilan kepada ketua program studi dalam menyusun rencana penerimaan dan rencana pengeluaran. Keterampilan ini diharapkan agar semua ketua program studi dapat mengelola keuangan dengan efektif dan efisien. pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk pelatihan, yang diikuti oleh 6 Ketua Jurusan dan 28 Ketua Program Studi. Pelatihan Manajemen Pembiayaan Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan FKIP Untan telah berhasil meningkatkan pemahaman para ketua jurusan dan program studi mengenai pengelolaan keuangan program studi mereka. Sebelum pelatihan, banyak yang belum memahami secara detail mengenai sumber-sumber pendapatan, komponen biaya, dan kondisi keuangan secara keseluruhan. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme pembiayaan pendidikan, termasuk pembagian dana UKT, potensi pendapatan non-UKT, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam era PTNBH. Pelatihan ini juga telah membuka wawasan para peserta tentang pentingnya perencanaan bisnis untuk meningkatkan pendapatan program studi.

ARTICLE INFO

Article History :

Received: December 2024

Accepted: January 2025

Keywords:

Training, Education
Financing Management,
Remuneration

ABSTRACT

This community service activity is intended to provide skills to study programme leaders in preparing revenue plans and expenditure plans. This skill is expected so that all study programme heads can manage finances effectively and efficiently. This community service is in the form of training, which was attended by 6 Department Heads and 28 Study Programme Heads. The Education Financing Management training held at FKIP Untan has succeeded in improving the understanding of the heads of departments and study programs regarding the financial management of their study programs. Before the training, many did not understand in detail about the sources of income, cost components, and overall financial condition. After the training, the participants have a better understanding of the education financing mechanism, including the distribution of UKT funds, potential non-UKT income, and the challenges and opportunities faced in the PTNBH era. The training has also opened the participants' insights into the importance of business planning to increase study programme income.

1. Pendahuluan

Perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan tinggi yang mencakup program diploma, program sarjana, program pasca sarjana, program profesi dan program spesialis. Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi terdiri atas beberapa bentuk yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola lembaga dengan mengacu pada tridharma perguruan tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (2014) menyatakan bahwa pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Di Indonesia perguruan tinggi berdasarkan pendiriannya terdiri atas 2 jenis yaitu perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dan perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh organisasi atau yayasan. Perguruan tinggi maupun swasta dalam pengelolaannya sama-sama mengacu pada tridharma perguruan tinggi.

Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tridharma tersebut, diperlukan pembiayaan pendidikan yang dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, (2012) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pola pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia terdiri atas 3 pola yaitu: (1) PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya; (2) PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan (3) PTN sebagai badan hukum. Walaupun berstatus milik negara, perguruan tinggi negeri tetap harus dapat melakukan manajemen pembiayaan yang baik agar dapat memberikan layanan yang berkualitas. Manajemen pembiayaan yang baik merupakan salah satu kunci dari keberhasilan sebuah lembaga pendidikan untuk memajukan atau meningkatkan kualitasnya. (Abidin, 2017).

Universitas Tanjungpura merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Kalimantan Barat yang berbentuk universitas dan pada saat ini berstatus sebagai badan layanan umum. Universitas Tanjungpura memiliki 9 Fakultas yang memberikan layanan pendidikan pada jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana dan profesi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi Satuan Kerja Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, (2020) menyatakan badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PPK-BLU berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2020 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi Satuan Kerja Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, (2020) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dosen dan tenaga kependidikan disebut sebagai pegawai BLU yang berhak menerima remunerasi atas total kompensasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen sebagai berikut: (1). Gaji; (2). Honorarium; (3). Tunjangan Tetap; (4). Insentif; (5). bonus atas prestasi; (6). pesangon; dan/ atau (7). pensiun. komponen remunerasi dapat berupa: (1). remunerasi bulan ketiga belas; (2). tunjangan Hari Raya; (3). uang lembur; dan (4). uang makan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, (2020) menyebutkan bahwa remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip: (1). proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/ atau layanan BLU; (2). kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang menaungi dan remunerasi pada penyedia layanan sejenis; (3). kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan (4). kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

BLU Universitas Tanjungpura berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi pegawai yang dianggarkan melalui anggaran BLU Universitas Tanjungpura yang tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sesuai Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sistem Remunerasi Pada Layanan Umum Universitas Tanjungpura. Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan merupakan dokumen yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu badan layanan umum.

Anggaran untuk pembayaran remunerasi ditetapkan dalam rencana bisnis anggaran dan rencana kerja dan anggaran tahunan. Anggaran yang digunakan untuk pembayaran remunerasi adalah berasal dari pendapatan PNBPU BLU Universitas Tanjungpura berupa pendapatan layanan pendidikan, pendapatan dari optimalisasi aset, dan pendapatan lain-lain yang sah;

Komponen remunerasi Universitas Tanjungpura terdiri dari: (1) *Pay for position* yaitu penghargaan atas peran dan jabatan yang diamanahkan kepada pegawai sesuai dengan organisasi dan tata kerja BLU Universitas Tanjungpura dan dikaitkan dengan harga jabatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BLU Universitas Tanjungpura; (2) *Pay for performance* yaitu penghargaan atas kinerja yang telah dicapai oleh pegawai berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan dan disepakati antara pegawai dan atasannya; (3) *Pay for people* yaitu penghargaan yang diberikan kepada perorangan sesuai dengan penugasan organisasi yang bersifat khusus dan dikaitkan dengan kondisi perorangan/perilaku berdasarkan ketentuan yang ditetapkan BLU Universitas Tanjungpura, yang besarnya dapat bervariasi tergantung kinerjanya.

Perhitungan remunerasi berdasarkan *pay for people* bagi pegawai diberikan sebagai penghargaan untuk perorangan/individu, pesangon, pensiun, dan fasilitas. Pembayaran *pay for people* memperhitungkan kemampuan pendapatan BLU Universitas Tanjungpura. Universitas Tanjungpura dengan banyak program studi didalamnya memiliki pendapatan yang beragam diantara

setiap program studi. Pembayaran remunerasi berdasarkan prinsip proporsionalitas diartikan sebagai pembayaran sesuai dengan pendapatan dari masing masing program studi, sehingga diperlukan manajemen pembiayaan pendidikan dengan menghitung pendapatan sebagai dasar pembayaran remunerasi bagi dosen.

Pelatihan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Tingkat Program Studi di Lingkungan FKIP Untan (Persiapan Menuju Remunerasi Berbasis Program Studi) berupaya memberikan keterampilan kepada ketua program studi dalam menyusun rencana penerimaan dan rencana pengeluaran menuju remunerasi berbasis program studi.

Pelatihan dilakukan menggunakan pendekatan praktik. Saat pelatihan berlangsung, disajikan materi mengenai penerimaan dan pengeluaran program studi. Sumber sumber penerimaan program studi dalam bentuk penerimaan yang bersumber dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), komponen pembiayaan dalam UKT, dan sebaran kelompok UKT mahasiswa. Sedangkan komponen pengeluaran program studi terdiri atas pembayaran remunerasi, biaya penelitian dan PKM, biaya pengembangan SDM, Biaya perjalanan dinas, biaya pengadaan dan biaya operasional. Proses pelatihan didampingi oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FKIP Untan dan anggota Dewan Pengawas Untan, yang menjelaskan tentang rincian penerimaan program studi pada semester berjalan dan rencana pembayaran remunerasi berdasarkan penerimaan masing masing program studi. Selain itu, pemateri juga menjelaskan mengenai bagaimana penganggaran PTNBH dan potensi apa saja yang dimanfaatkan oleh program studi dan fakultas untuk meningkatkan penerimaan. Setelah pelatihan berakhir, peserta dapat mempersiapkan penyusunan rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk tahun anggaran 2025.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan keterampilan kepada ketua program studi dalam menyusun rencana penerimaan dan rencana pengeluaran. Keterampilan ini diharapkan agar semua ketua program studi dapat mengelola keuangan dengan efektif dan efisien. Manfaat kegiatan bagi khalayak sasaran, yakni ketua jurusan dan ketua program studi di lingkungan FKIP Untan. Peserta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan ini mampu: (1) memiliki keterampilan dalam menyusun rencana penerimaan dan rencana pengeluaran; (2) dapat menyusun rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk tahun anggaran 2025.

2. Metode Pelaksanaan

Kerangka Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan 2 langkah yaitu pelaksanaan pelatihan dan melakukan pendampingan secara langsung kepada peserta yang terdiri atas 6 orang ketua jurusan dan 28 orang ketua program studi jenjang D3, S1, dan S2 di lingkungan FKIP Untan. Kegiatan dilaksanakan di ruang sidang FKIP Untan pada tanggal 25 November 2024.

Realisasi Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah berkaitan dengan masalah utama yang dialami oleh peserta yaitu :

- a. Penjelasan pemateri mengenai penerimaan program studi.
- b. Penjelasan pemateri mengenai pengeluaran program studi.
- c. Penjelasan pemateri mengenai rencana usaha fakultas.
- d. Penjelasan pemateri mengenai penganggaran PTNBH.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran adalah ketua program studi di lingkungan FKIP Universitas Tanjungpura yang terdiri atas 1 orang ketua program studi jenjang D-3, 19 orang ketua program studi jenjang S-1 dan 8 orang ketua program studi jenjang S-2. Sebagaimana pada latar belakang, FKIP Universitas Tanjungpura akan melakukan pembayaran remunerasi berbasis program studi sehingga setiap ketua program studi harus dapat melakukan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik. Hal ini dapat dipersiapkan dengan memberikan pelatihan yang menghadirkan pemateri dosen yang memiliki keterampilan dalam pembiayaan pendidikan.

Metode Yang Digunakan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, dengan rangkaian:

a. Pelatihan:

- 1) Penjelasan pemateri tentang: (1) Sumber penerimaan program studi; (2) Komponen pembiayaan UKT; & (3) Sebaran kelompok UKT.
- 2) Penjelasan pemateri tentang jenis jenis pengeluaran program studi yang terdiri atas : (1) Pembayaran remunerasi; (2) Biaya penelitian dan PKM; (3) Biaya pengembangan SDM; (4) Biaya perjalanan dinas; (5) Biaya pengadaan & (6) Biaya operasional.
- 3) Penjelasan pemateri mengenai rencana bisnis FKIP Untan yang terdiri atas : (1) Optimalisasi SDM atau tenaga ahli; (2) Optimalisasi laboratorium pembelajaran & (3) Optimalisasi aset.
- 4) Penjelasan pemateri mengenai penganggaran PTNBH yang terdiri atas : (1) Karakteristik PTNBP; (2) Penganggaran pada PTNBLU dan PTNBH; (3) Efisiensi pembiayaan dan potensi perilaku koruktif; (4) Potensi pendapatan non UKT & (5) Kebijakan keuangan.

b. Pendampingan

- 1) Pemateri memberikan data sebaran kelompok UKT masing masing program studi, rekap penerimaan dan rekap pengeluaran.
- 2) Pemateri memberikan data rencana bisnis FKIP Untan sebagai dasar penyusunan rencana bisnis program studi.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil kegiatan Pelatihan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Tingkat Program Studi Di Lingkungan FKIP Untan (Persiapan Menuju Remunerasi Berbasis Program Studi) terdapat peningkatan pemahaman ketua jurusan dan ketua program studi di lingkungan FKIP Untan mengenai jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran masing masing program studi. Sebelum mengikuti kegiatan pelatihan, ketua jurusan dan ketua program studi tidak mengetahui berapa jumlah penerimaan program studi yang bersumber dari dana UKT mahasiswa dan BOPTN, serta tidak mengetahui berapa rekap pengeluaran program studi selama tahun anggaran 2024. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, ketua jurusan dan ketua program studi mengetahui berapa jumlah penerimaan yang bersumber dari UKT dan dana BOPTN. Ketua jurusan dan ketua program studi juga mengetahui pembagian penerimaan UKT untuk universitas, fakultas dan program studi serta komponen pembiayaan apa saja yang melekat pada pembiayaan fakultas dan program studi.

Sebelum mengikuti kegiatan pelatihan, ketua jurusan dan ketua program studi tidak mengetahui status keuangan program studi apakah mengalami surplus anggaran atau defisit anggaran. Setelah

mengikuti kegiatan pelatihan, ketua jurusan dan ketua program studi mengetahui kondisi keuangan masing masing program studi sesuai dengan data yang ditampilkan dan dijelaskan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FKIP Untan.

Adapun alur kerja pelaksanaan materi mengenai penerimaan dan pengeluaran program studi sebagai berikut:

- Pemateri menjelaskan sumber penerimaan universitas yang terdiri dari UKT (PNBP) dan BOPTN (APBN).
- Pemateri menjelaskan pembagian penerimaan yang bersumber dari UKT untuk universitas, fakultas dan program studi.
- Pemateri menjelaskan komponen pembiayaan yang dibebankan ke fakultas dan program studi.
- Pemateri menampilkan rekap penerimaan dan pengeluaran masing masing program studi.
- Pemateri menjelaskan status surplus atau defisit anggaran masing masing program studi.

Tahapan berikutnya yang dilakukan adalah penjelasan mengenai rencana bisnis berdasarkan identifikasi potensi usaha yang disusun oleh Unit Bisnis FKIP Untan. Rencana bisnis ini sangat penting untuk menambah penerimaan program studi yang selama ini hanya bersumber dari UKT dan BOPTN saja. Sebelum mengikuti kegiatan pelatihan, ketua jurusan dan ketua program studi belum mengetahui potensi usaha FKIP Untan. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, ketua jurusan dan ketua program studi mengetahui apa saja rencana bisnis dalam setiap strategi bisnis yang akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan yang terdiri atas strategi bisnis dengan optimalisasi SDM atau tenaga ahli, optimalisasi laboratorium pembelajaran dan optimalisasi aset.

Adapun alur kerja pelaksanaan materi mengenai penerimaan dan pengeluaran program studi sebagai berikut:

- Pemateri menjelaskan tentang strategi bisnis FKIP Untan yang terdiri atas optimalisasi SDM atau tenaga ahli, optimalisasi laboratorium pembelajaran dan optimalisasi aset.
- Pemateri menjelaskan rencana bisnis dari masing masing startegi bisnis dan tahun pelaksanaan kegiatan.
- Pamteri menjelaskan peran program studi dalam stratgei bisnis FKIP Untan dan potensi bisnis yang dapat dilakukan program studi sesuai dengan sumber daya yang ada pada masing masing program studi.



Gambar 1. Penyampaian materi tentang anggaran penerimaan dan pengeluaran program studi

Tahapan terakhir yang dilakukan adalah penjelasan mengenai penganggaran dalam PTNBH yang disampaikan oleh anggota dewan pengawas Untan. Sebelum mengikuti kegiatan pelatihan, ketua jurusan dan ketua program studi belum mengetahui bagaimana persiapan Untan menuju PTNBH dan bagaimana dampaknya pada program studi. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, ketua jurusan dan ketua program studi mengetahui karakteristik PTNBP, penganggaran pada PTNBLU dan PTNBH, Efisiensi pembiayaan dan potensi perilaku koruktif, potensi pendapatan non UKT, dan kebijakan keuangan yang dapat dilakukan mulai di tingkat program studi, fakultas dan universitas.

Adapun alur kerja pelaksanaan materi mengenai penganggaran PTNBH sebagai berikut:

- Pemateri menjelaskan karakteristik PTNBP.
- Pemateri menjelaskan penganggaran PTNBLU dan PTNBH.
- Pemateri menjelaskan pembiayaan dan potensi perilaku koruktif di lingkungan perguruan tinggi.
- Pemateri menjelaskan potensi apa saja yang bisa menjadi penerimaan selain UKT.
- Pemateri menjelaskan kebijakan pengelolaan keuangan mulai di tingkat program studi, fakultas dan universitas.



Gambar 2. Penyampaian materi tentang penganggaran dalam PTNBH

Pembahasan

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Manajemen Keuangan

Pada prinsipnya kegiatan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, dalam hal ini tentu berkaitan dengan upaya peningkatan pengetahuan dan manajemen keuangan ketua jurusan & ketua program studi di FKIP Untan. Dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk pelatihan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia berupa peningkatan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang manajemen keuangan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Niati, dkk., 2019).

Peningkatan kapasitas sumberdaya di bidang manajemen keuangan, secara khusus dapat diarahkan untuk meningkatkan keterampilan manajemen keuangan jangka pendek, dan pula meningkatkan efikasi diri keuangan peserta pelatihan (Kirsten, 2018). Selain itu, secara keseluruhan diharapkan akan memberi dampak pada peningkatan perilaku positif di bidang keuangan di tempat kerja peserta pelatihan (Kurniatun, dkk. 2021). Selain dua ulasan di atas, Diamantidis & Chatzoglou (2014), juga mengungkapkan bahwa keberhasilan peningkatan performa kerja pasca pelatihan, efikasi diri, dan perilaku pasca pelatihan berkaitan langsung dengan desain program pelatihan yang

telah dirancang sebelum pelatihan. Hal ini juga tentunya berhubungan dengan kontekstual materi pelatihan yang diberikan, yang memang menjadi kebutuhan peserta.

Pembiayaan Pendidikan yang Efisien

Hasil penelitian Amrizal, dkk. (2021) menemukan bahwa proses perencanaan pembiayaan dapat menggunakan pola bottom up, berupa pelibatan unit kerja terendah (Program Studi, Unit-unit) hingga tingkat universitas, hal ini diperlukan sehubungan dengan pendapatan non pajak yang bersumber dari APBN. Selain itu, proses perencanaan pembiayaan yang bottom up akan memudahkan pengendalian secara umum, serta dapat menjadi kontrol penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kegiatan pelatihan ini memfokuskan pada upaya meningkatkan efisiensi pengeluaran, sejalan dengan temuan penelitian Mukhlis & Pranoto (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat tiga aspek efisiensi dalam pengelolaan keuangan unit, yaitu efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan efisiensi hasil yang dicapai. Sementara itu Laras & Rahmawati (2022) menekankan bahwa upaya efisiensi berhubungan langsung dengan pengendalian internal yang berdampak pada pengurangan kejadian fraud dalam pengelolaan keuangan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pelatihan Manajemen Pembiayaan Pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan FKIP Untan telah berhasil meningkatkan pemahaman para ketua jurusan dan program studi mengenai pengelolaan keuangan program studi mereka. Sebelum pelatihan, banyak yang belum memahami secara detail mengenai sumber-sumber pendapatan, komponen biaya, dan kondisi keuangan secara keseluruhan.

Setelah mengikuti pelatihan, para peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme pembiayaan pendidikan, termasuk pembagian dana UKT, potensi pendapatan non-UKT, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam era PTNBH. Pelatihan ini juga telah membuka wawasan para peserta tentang pentingnya perencanaan bisnis untuk meningkatkan pendapatan program studi. Dengan bekal pengetahuan yang baru ini, diharapkan para ketua jurusan dan program studi dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengelola keuangan program studi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan-tujuan strategis institusi.

Saran

Saran yang dapat direkomendasikan adalah perlunya pelatihan lanjutan, yang berkala dengan tema-tema yang lebih spesifik, termasuk pengelolaan resiko keuangan. Dapat pula dalam bentuk workshop. Untuk meningkatkan penerimaan prodi melalui layanan BLU terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yakni peningkatan jumlah mahasiswa yang terukur, membuka kelas kerjasama & kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Selain itu tentu saja yang paling utama perlu dilakukan setiap unit termasuk program studi adalah melakukan efisiensi pengeluaran yang terukur, yang tidak menurunkan kualitas pelayanan pembelajaran dan perkantoran.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih dan penghargaan kami haturkan kepada 6 Ketua Jurusan dan 28 Ketua Program Studi di lingkungan FKIP Untan yang telah mengikuti kegiatan ini. Tentu dan terutama, terima kasih dan penghargaan kami haturkan kepada Narasumber kegiatan, Bapak Kukuh Sumardono Basuki, yang merupakan Kepala DJPb Provinsi Kalimantan Barat, yang juga merupakan Dewan Pengawas Universitas Tanjungpura.

6. Daftar Pustaka

- Abidin, A. A. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 87–99.
- Amrizal, A., Bahrin, B., & Yusrizal, Y. (2021). Management of Educational Financing in Higher Education. *Journal of Education Research and Evaluation*, 5(4), 536-541.
- Diamantidis, A. D., & Chatzoglou, P. D. (2014). Employee post-training behaviour and performance: evaluating the results of the training process. *International Journal of Training and Development*, 18(3), 149-170.
- Kirsten, C. L. (2018). The role of financial management training in developing skills and financial self-efficacy. *The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management*, 10(1), 1-8.
- Kurniatun, T. C., Sihombing, R. C. I., & Guswati, L. (2021). Post-Training Evaluation in Financial Sector. In *Proceeding of International Conference on Research of Educational Administration and Management (ICREAM)* (Vol. 5, No. 1, pp. 89-96).
- Laras, P., & Rahmawati, I. D. (2022). Effect of Implementation of Procurement of Goods/Services through E-Procurement and Internal Control on Fraud Prevention in Sidoarjo Regency. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20, 10-21070.
- Muhajir; Nur Muhammad Najmi, Bachtar; Machdum, & Fauzi; Anis. (2023). Pentingnya Manajemen Pembiayaan dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 4684–4689.
- Mukhlis, M., & Pranoto, R. (2020). The Implication of Electronics Procurement for Financial Efficiency and Optimization of Government Functions. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 8(1), 38-56.
- Niati, A., Suhardjo, Y., Wijayanti, R.Y., & Hanifah, R.U. (2019). Pelatihan Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pesantren bagi Pengelola Yayasan Pondok Pesantren X di Kota Semarang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, 2020 (2020). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi Satuan Kerja Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2020 1 (2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 2014 1 (2014).

Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sistem Remunerasi Pada Layanan Umum Universitas Tanjungpura, 2021 1 (2021).

Tabi'in; As'adut. (2024). Manajemen Pembiayaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatun Najah). *JPMP: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 52–61.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2012 1 (2012). www.djpp.depkumham.go.id